

PENGARUH PELKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN TERHADAP PERKEMBANGAN KOMUNIS DI INDONESIA TAHUN 1959 – 1965

Oleh :

Lia Mardani, Anggar Kaswati, E. Wagiyah

Abstrak

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno menganggap bahwa maksud terpimpin adalah bahwa dalam pembentukan lembaga-lembaga Negara semuanya atas penunjukan Presiden bukan melalui pemilihan, sehingga kepemimpinan Presiden Sukarno pada masa itu di anggap menyimpang dari UUD 1945. Masuknya Komunis di Indonesia diawali dengan datangnya seorang warga Negara Belanda yang bernama H.J.F.M Sneeviliet, pada tahun 1913 yang membawa paham marxisme dan kemudian ditanamkan di Indonesia melalui Serikat Buruh Vereninging Spoor en Tramweg-Personeel (VSTP) dan kemudian ditanamkan di Indonesia melalui Indische sociaal Democratische Vereniging (ISDV). PKI yang sejak tahun 1948 dapat ditumpas, pada tahun 1965 hidup kembali dan melakukan pemberontakan yang dikenal dengan sebutan Gestapu. Untuk melawan Pemberontakan PKI munculah gerakan dari masa pemuda, dan menuntut untuk pembubaran PKI dengan sebutan Tritura yang akhirnya menyatakan PKI di bubarkan sebagai Partai terlarang di Indonesia.

Kata Kunci: *Demokrasi Terpimpin, Komunis, Indonesia, 1959-1965.*

Latar Belakang

Indonesia sebelum melaksanakan demokrasi Terpimpin, terlebih dahulu menggunakan demokrasi Liberal, sehingga gerakan untuk membubarkan Negara Federal dan membentuk Negara Kesatuan semakin kuat. Dengan demikian maka dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Marwati Djoened Poesponegoro, 1933: 206). Namun, sistem demokrasi liberal ini tidak stabil, sehingga berdampak pada program kerja kabinet, selain itu pada masa demokrasi terpimpin ini partai-partai politik saling menjatuhkan.

Ir Soekarno pertama kali mengumumkan terkait demokrasi terpimpin pada pembukaan sidang konstituante pada 10 November 1956. Demokrasi terpimpin sangat erat hubungannya dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya Demokrasi Liberal yang kemudian digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Berdasarkan latarbelakang tersebut peneliti memfokuskan penelitian tentang

pengaruh pelaksanaan demokrasi terpimpin terhadap perkembangan komunis di Indonesia pada tahun 1959-1965.

Penetapan Demokrasi Terpimpin Di Indonesia

Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia telah memiliki undang-undang dasar yang dikenal dengan UUD 1945. Indonesia beberapa kali berganti sistem pemerintahan, salah satu sistem pemerintahan yang pernah dianut ialah demokrasi liberal. Setelah Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, dan UUD 1945 diganti dengan undang-undang dasar sementara (UUDS 1950). Menurut UUDS 1950, kekuatan legislatif dipegang oleh presiden, kabinet dan DPR, (Marwati Djoened Poesponegoro VI, 1933 : 210).

Presiden Soekarno mempunyai pandangan bahwa konstituante yakni sebuah lembaga Negara yang ditunjuk untuk menyelesaikan tugasnya dalam menyusun undang-undang dasar, karena dianggap tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna, maka Presiden membubarkan lembaga tersebut dan menyatakan berlakunya UUD 1945, serta tidak berlakunya kembali Undang – Undang Sementara (UUDS 1950), (S.M. Amin 10967 : 13 – 18). Setelah adanya Dekrit Presiden, maka susunan kabinet badan lembaga negara didasarkan atas penunjukan Presiden, atas dasar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai ketata-negaraan yang normal, (C.S.T. Kansil, 1082 : 76). Tanggal 22 Juli 1959, Presiden menetapkan pembentukan MPRS dan DPAS.

Rakyat yang sudah lama mendambakan kestabilan politik berharap kepada berlakunya UUD 1945 dalam demokrasi terpimpin. Menurut UUD 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, baik parlemen maupun Presiden berada dibawah majelis permusyawaratan rakyat. Pengertian terpimpin dalam UUD 1945, adalah hikmah dalam kebijaksanaan atau perwakilan. Namun penafsiran Soekarno berbeda maksud terpimpin menurut Soekarno adalah sebagai pemimpin.

Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Pada tanggal 21 Februari 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan

konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Demokrasi Terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 pada tanggal 19 Februari 1959.

Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Ir. Djuanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk melakukannya melalui Dekrit Presiden (Marwati Djoened Poesponegro VI, 1933 : 311).

Dekrit yang memuat tiga hal pokok yaitu :

1. Menetapkan pembubaran Konstituante.
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan
3. Tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS).

Sehari sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Djuanda mengembalikan mandat kepada Soekarno, kemudian Soekarno membubarkan Kabinet Karya. Pada tanggal 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Presiden Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti imperialisme-kapitalisme, anti demokrasi liberal, dan perubahan secara total, (Marwati Djoened Poesponegoro VI, 1933 : 317).

Pada Demokrasi Terpimpin, sering terjadi reaksi-reaksi terhadap kebijakan yang dibuat oleh Soekarno. Reaksi tersebut diantaranya muncul dari kalangan partai politik, seperti dari kepemimpinan Nahdatul Ulama (NU) dan PNI. DPR dalam hasil pemilu

1955 tersebut masih diberi kesempatan untuk menjalankan tugasnya sampai dengan adanya pembentukan DPR baru. Tetapi karena DPR hasil pemilu 1955 tersebut menolak anggaran belanja pemerintah tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah, Presiden Sukarno marah besar dan kemudian keluaran penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960, yang menyatakan pembubaran atau penghentian pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, (S.M.Amin, 1967 : 47 – 48).

Didalam liga Demokrasi yang diketuai oleh Imron Rosyadi. Pada akhir bulan Maret 1960 Liga tersebut mengeluarkan suatu pernyataan yang antar lain menyebutkan supaya dibentuk DPR yang demokratis dan konstitusional. Usaha-usaha Presiden Sukarno untuk membentuk Kabinet Gotong Royong pada tahun 1960, mendapat tantangan dari golongan Agama dan pemimpin TNI – AD. Namun Presiden Sukarno memberi angin kepada PKI dengan memberikan mereka kedudukan dalam DPR GR dan DPA serta dalam pengurus Besar Front Nasional dan Pengurus Front Nasional Daerah, (Marwati Djoened Poesponegoro VI, 1933: 318 – 319).

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Sukarno mengumumkan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Namun dalam pelaksanaan tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi, bahkan sebaliknya malah memperberat beban hidup rakyat dengan makin meningkatkan harga dan tarif, (Nugroho Notosusanto, 1958 : 227).

Perkembangan Komunis

Lahir dan berkembangnya gerakan komunis di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi yang bernama ISDV (*Indische Sociaal-democratische Vereeniging*). Organisasi kaum sosialis Belanda yang pada mulanya merupakan klub debat kecil diantara sesama anggota mereka. Klub ini didirikan oleh Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet di Semarang pada bulan Mei 1914. Pada tanggal 23 Mei 1920 berdirilah Perserikatan Kommunist di India (PKI). Tujuh bulan kemudian partai ini mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia, dengan Samaoen sebagai ketuanya.

Krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1920 memberikan lahan yang subur bagi pertumbuhan PKI. Prinsip pertentangan kelas yang dianut PKI mendapatkan basisnya di tengah-tengah kemiskinan masyarakat. Dalam propaganda politiknya,

ideologi komunis menempatkan kaum proletar (masyarakat miskin dan kaum buruh) serta masalah yang menimpa kelas tersebut sebagai isu utama perjuangan. Dalam kondisi krisis tersebut, PKI berhasil menggalang massa untuk melakukan tindakan-tindakan radikal dan revolusioner, (Poesponegoro : 208).

Masuknya paham Marxisme yang kemudian menjadi PKI di Indonesia tahun 1913 dibawa dari negeri Belanda oleh H.J.F.M. Sneevliet, seorang warga negara Belanda yang menjadi anggota Partai Buruh Sosial Demokrat negeri Belanda (SDAP). Pada tanggal 9 Mei 1914, Sneevliet bersama-sama dengan J.A. Bransteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma berhasil mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). (Marwati Djoened Poesponegoro V, 1996 : 198-199). Pada akhir tahun 1917 ISDV mulai mengerahkan serdadu-serdadu dan para pelaut Belanda untuk aksi-aksi mereka. Dalam waktu 3 bulan ISDV berhasil mengumpulkan 300 orang ke dalam gerakan tersebut, (Mawarti Djoened Poesponegoro V, 1993 : 200-201).

Setelah berhasil menempatkan dirinya sebagai partai terbesar, PKI merasa dirinya kuat untuk melancarkan suatu petualangan yang akhirnya membawa malapetaka bagi ribuan patriot Indonesia. Petualangan tersebut dikenal dengan nama Pemberontakan 1926, (Mawarti Djoened Poesponegoro V, 1993 : 207-208). Sepuluh tahun kemudian setelah pemberontakan PKI tahun 1926, Gerakan Komunis Internasional mengirimkan seorang tokoh PKI kembali ke Indonesia, yaitu Musso untuk menjalankan suatu kebijaksanaan baru dari Gerakan Komunis Internasional yang dikenal dengan nama Doktrin Dimitrov yaitu bahwa gerakan komunis harus bekerjasama dengan kekuatan manapun juga, termasuk kaum imperialis, (Mawarti Djoened Poesponegoro V, 1993 : 209). Pada tanggal 28 Juni 1948, kelompok Amir Syarifuddin yang menempatkan diri sebagai oposisi terhadap Kabinet yang dipimpin oleh Bung Hatta, telah membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang terdiri dari Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, PKI dan Subsi (Nugroho Notosusanto, 1975 : 184).

Bersama dengan kegiatan FDR, pada bulan Agustus 1948 Musso seorang tokoh kawakan PKI yang bermukim di Moskow bersama dengan Suripno Duta Besar RI di Praha, telah kembali ke tanah air. Kedatangan Musso tersebut membawa garis baru bagi kaum komunis dan membawa perubahan-perubahan besar dalam gerakan komunis,

(C.S.T. Kansil, 1982 : 57-58). Kemudian pada tanggal 18 september 1948, PKI yang dipimpin oleh Musso melakukan perebutan kekuasaan (*Coup*), yang dimulai di Madiun dan daerah Surakarta.

Akibat pecahnya pemberontakan PKI di Madiun, maka Pemerintah segera mengambil tindakan-tindakan untuk menumpasnya, yaitu melalui Gerakan Operasi Militer (GOM) I yang dilancarkan oleh Angkatan Perang. Dalam waktu dua minggu tepatnya pada tanggal 30 September 1948, jam 16.15 kota Madiun berhasil direbut kembali. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1948 Musso, selaku pimpinan pemberontakan di Madiun itu dapat terbunuh, (Marwati Djoened Poesponegoro, 1993 : 155-156).

Hal ini terbukti pada tahun 1950 PKI dapat mengadakan penggalangan masa di desa-desa, dengan pimpinan aksi-aksi buruh dan Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBBSI), yaitu federasi yang dikuasai sejak akhir tahun 1946.

PKI sejak semula mendukung konsepsi Presiden, memperhitungkan bahwa dengan mendukung konsepsi tersebut, PKI akan dapat menuju ke realisasi Nasakom. Konsepsi Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) pada hakekatnya berarti mengikutsertakan dan masukkan komunisme ke dalam pelaksanaan Pancasila. Padahal komunisme didasarkan atas “dialektis materialism”, jadi anti Ketuhanan lagi pula komunisme mengandung konsepsi perjuangan yang asing bagi Pancasila (Nugroho Notosusanto, 1977 : 107).

PKI memiliki kedudukan yang sama derajatnya dengan PNI dan NU. Untuk itu didalam usaha mempertahankan posisinya menghadapi tentara, Presiden Soekarno bergantung pada PKI. Jika dilihat dari kepentingan PKI, sebenarnya ketergantungan Presiden Soekarno kepada PKI tersebut bersifat timbal balik, (Herbert Feith, 1995 : 44).

Keberhasilan komunis di Jawa Tengah dan Jawa Timur mampu mencapai mayoritas di beberapa dewan kota atau dewan daerah dan dengan cara tersebut mereka mampu menempatkan posisi walikota atau pejabat-pejabat tinggi komunis lainnya. Akan tetapi kemenangan komunis dalam pemungutan suara berakibat mempertinggi keresahan dalam lingkungan politik tertentu baik didalam maupun luar negeri mengenai kekuatan potensial komunis di Jawa (W.F. Wertheim, 1999 : 287-288).

Dampak Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Bagi Komunis

Didalam usahanya menggalang persatuan dan kesatuan, Presiden memaklumkan adanya prinsip Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) sebagai pencerminan golongan-golongan dalam masyarakat. Hanya dengan persatuan itu bangsa Indonesia dapat menjadi kuat dan mampu menghasilkan program Kabinet Kerja yang ketiga, (G. Moedjanto, 1989 : 117).

Partai Komunis Indonesia (PKI) sejak semula memang sudah mendukung konsepsi Presiden Soekarno dengan perhitungan bahwa dengan mendukung konsepsi tersebut, PKI akan dapat menuju ke realisasi Nasakom (Nasakomisasi, Kabinet Gotong Royong dan lain-lain). Usaha mencapai cita-cita untuk mewujudkan sosialisme dan komunisme di Indonesia, PKI menjalankan tindakan-tindakan seperti; memecah belah atau menyusupi kekuatan partai atau organisasi masa dan badan-badan lainnya dari pihak lawan (Nugroho Notosusanto, 1977 : 107).

Selanjutnya untuk mengaburkan tuduhan bahwa PKI bersifat internasional dan anti agama, maka PKI mengakui menganut Manipol yang telah dikatakan mencakup Pancasila. Dengan alasan bahwa Manipol adalah satu-satunya dontrin Revolusi Indonesia yang harus dipegang teguh. Sejak tahun 1959 PKI telah berhasil menginfiltrasi Partai Nasional Indonesia (PNI). Hal itu dibuktikan bahwa pada waktu itu PNI telah mengubah pengertian Marhaenisme menjadi Marxisme yang diterapkan dalam kondisi Indonesia.

Pada malam 30 September - 1 Oktober 1965, enam jenderal senior TNI diculik dan dieksekusi di Jakarta oleh batalyon tentara dari Resimen Tjakrabirawa (Pengawal Presiden) dalam sebuah aksi yang kemudian disebut oleh Soeharto sebagai "percobaan kudeta". Faksi sayap kanan TNI yang membawahi enam jenderal tersebut hancur, termasuk Panglima Staf Angkatan Darat yang paling berkuasa, Ahmad Yani. Sekitar 2.000 personil tentara dari kelompok tersebut menempati tiga sisi Lapangan Merdeka, dan menduduki Istana Merdeka, kantor Radio Republik Indonesia, dan pusat telekomunikasi, tetapi tidak menempati sisi timur, tempat markas Kostrad. Menyebut diri mereka "Gerakan 30 September" (disingkat "G30S"), kelompok ini mengumumkan di radio RRI sekitar pukul 7:00 WIB bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh *Central Intelligence Agency* (CIA) Amerika Serikat yang direncanakan untuk menghapus Soekarno dari kekuasaan, (www.Muslimdaily.Net).

Dalam kampanye tersebut, Gerakan 30 September disebut "Gestapu" (dari "Gerakan September Tigapuluh"). Pada tanggal 18 Oktober, sebuah deklarasi dibacakan melalui semua stasiun radio yang dikendalikan militer, menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia adalah partai terlarang. Larangan tersebut termasuk partai PKI sendiri dan semua "onderbouw"-nya (sayap organisasi) seperti organisasi pemuda dan perempuan, asosiasi petani, intelektual dan kelompok mahasiswa, dan serikat buruh SOBSI.

Pada Oktober 1965, mahasiswa di Jakarta membentuk KAMI ("Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia"), yang menyerukan pelarangan PKI. Organisasi ini segera dimasuki sejumlah organisasi serupa yang terdiri dari siswa SMA, pekerja, seniman, buruh dan sejenisnya.

Pada 10 Januari 1966, para demonstran, termasuk KAMI, berdemonstrasi di depan gedung DPR dan mengumumkan apa yang dikenal sebagai "Tri Tuntutan Rakyat" (Tritura):

1. Pembubaran PKI dan organisasi-organisasi massanya
2. Pengusiran elemen PKI dari kabinet dengan adanya perombakan
3. Harga kebutuhan pokok yang lebih rendah dan perbaikan ekonomi tersebut.

Pada tanggal 11 Agustus, sebuah perjanjian damai ditandatangani, secara resmi mengakhiri "Konfrontasi" Indonesia-Malaysia. Indonesia mengumumkan akan bergabung kembali dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perjanjian ini termasuk pembebasan tahanan politik Soekarno dan pembayaran kompensasi kepada pemerintah Inggris dan Amerika Serikat atas kerusakan yang terjadi pada bangunan diplomatik mereka selama demonstrasi di era Soekarno. Pada 10 Januari 1967, Soekarno menulis kepada MPRS, melampirkan dokumen yang dikenal sebagai "Nawaksara", memberikan versinya tentang peristiwa seputar Gerakan 30 September. id.wikipedia.org.

Kesimpulan

Dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, karena menurut Presiden Sukarno bahwa konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang – Undang Dasar, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna dan kinerjanya yang berlarut –

larut akan menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan negara, nusa dan bangsa.

Masuknya Komunis di Indonesia diawali dengan datangnya benih – benih paham Marxisme yang dibawa oleh H.J.F.M Sneevliet dari Belanda yang kemudian ditanamkan di Indonesia, melalui serikat buruh (VSTP) serta mendirikan organisasi *Indische Social Democratische Vereniging* (ISDV), yang kemudian berhasil masuk ke dalam Sarekat Islam dan pada bulan Mei 1920 ISDV diganti menjadi perserikatan Komunist di Hindia. Kedatangan Mmusso dan Suripno dari Moskow pada bulan Agustus 1948 dapat mempengaruhi Amir Syarifudin untuk menggabungkan diri dengan PKI dan kemudian Pada tanggal 18 September 1948, PKI melakukan perbutan kekuasaan di daerah Madiun dan Surakarta.

Puncak pemberontakan PKI yang kedua terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, dengan menamakan derakan 30 September (Gestapu) yang berhasil menculik dan membunuh para perwira TNI Angkatan Darat dan menduduki gedung RRI dan Gedung Telekomunikasi. Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar 1966) maka PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Seluruh wilayah RI.

Daftar Pustaka

- Amin S.M, 1967. *Indonesia DibawahRezim Demokrasi Terpimpin*, Jakarta, BulanBintang.
- Herbert Feith, 1995. *Sukarno – Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*, Jakarta :PustakaSinarHarapan.
- Kansil C.S.T, 1982 :*Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Marwati Djoened Poesponegoro, 1993. *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta :Balai Pustaka.
- _____, 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta :Balai Pustaka.
- Moedjanto G, 1989. *Indonesia Abad Ke-20 Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai pelita III*, Yogyakarta :Kanisius.
- Nugroho Notosusanto, 1977. *Sejarah Nasional Indonesia, Jaman Jepang Dan Jaman Republik Indonesia*, Jakarta :BalaiPustaka.
- <http://www.muslimdaily.net/artikel/special-feature/serial-komunisme-masuk-dan-berkembangnya-komunisme-di-indonesia.html>, diakses pada 13 Juni 2017